FIHRRST
Foundation for International Human Rights Reporting Standards

HUMAN RIGHTS ON SUSTAINABLE BUSINESS

Marzuki Usman

PENDIRI FIHRRST

Jakarta, 16 Maret 2017

BISNIS BERKELANJUTAN

Pada tanggal 25 September 2015, 193 Anggota Majelis Umum PBB mengadopsi
Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kerangka tersebut terdiri dari 17 tujuan dan 169 target untuk menghapus kemiskinan, melawan ketidakadilan dan mengatasi perubahan iklim selama 15 tahun ke depan.

Kerangka *Sustainable Development Goals* ini,
mencakup semua isu-isu terkait hak asasi manusia

termasuk ekonomi, sipil, budaya, politik, sosial dan hak untuk berkembang.

HAK ASASI MANUSIA DAN BISNIS

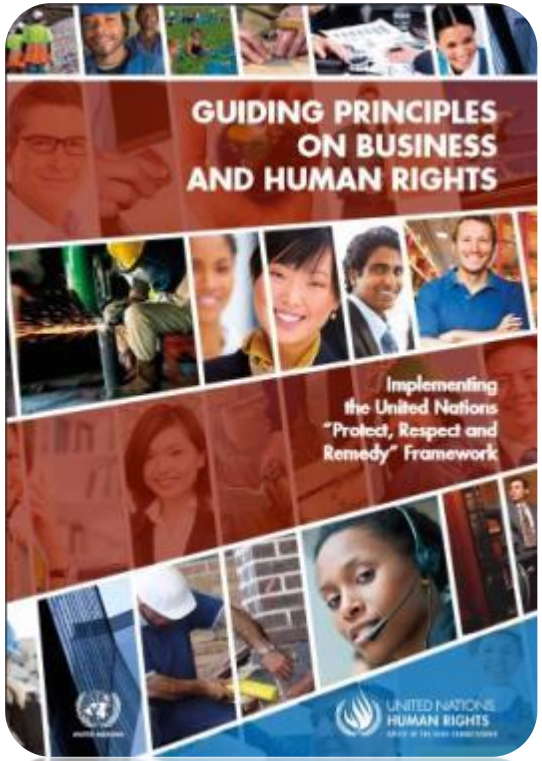

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) **2011**

PROTECT	TUGAS NEGARA UNTUK **MELINDUNGI**
RESPECT	TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UNTUK **MENGHORMATI**
REMEDY	AKSES TERHADAP **PEMULIHAN**

KEUNTUNGAN MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA DALAM BISNIS

- Membuka kesempatan untuk menjadi bagian dari jaringan rantai pasokan perusahaan-perusahaan multinasional yang mengisyaratkan penghormatan HAM dalam seleksi pemasoknya
- Membuka kesempatan bisnis lebih luas di negara yang telah menyusun Rencana Aksi Bisnis dan HAM
- Sertifikat HAM pada produk akan meningkatkan kepercayaan konsumen
- Meningkatkan kepercayaan investor yang menekankan pada *"Socially Responsible Investment"*

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM BISNIS

KASUS PUSAKA BENJINA

- 682 awak kapal penangkap ikan di Benjina yang berasal dari Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam menjadi korban perdagangan manusia
- Kasus Pusaka Benjina melibatkan 8 perusahaan yang berasal dari Singapura, Thailand dan Indonesia
- Pengadilan Negeri Tual (Maluku) telah memvonis 8 tersangka (5 kapten dari Thailand dan 3 orang lainnya dari Indonesia) dengan hukuman penjara dan denda finansial

KASUS IOI GROUP MALAYSIA

- IOI Grup diberhentikan sementara dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* atas tuduhan deforestasi, konversi lahan gambut dan pelanggaran hak asasi dalam rantai pasokannya
- Akibatnya, pelanggan IOI mulai mencari pemasok lain untuk kelapa sawit, yang digunakan dalam segala hal dari makanan ringan hingga sabun dan kosmetik.
- Greenpeace menginginkan IOI untuk “memberlakukan moratorium pada semua pengembangan perkebunan di rantai pasokan"

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM BISNIS

KASUS INDUSTRI PERIKANAN THAILAND

- The Guardian memaparkan peranan yang luas dari pemerintah, nelayan dan para pelaku perdagangan manusia di Thailand dalam memperbudak ribuan orang Rohingya (migran dari Myanmar) yang ditahan di hutan untuk diperdagangkan dan dijual ke kapal-kapal nelayan Thailand
- Penyelidikan The Guardian menyoroti bahwa para pekerja budak dipaksa bekerja tanpa dibayar selama bertahun-tahun

- Publikasi tersebut berdampak sangat signifikan bagi industri makanan laut di Thailand baik dari segi reputasi global, dan juga hilangnya pendapatan dari industri perikanan Thailand
- Departemen Luar Negeri AS merilis laporan perdagangan orang secara global *(Global Trafficking in Persons/ TIP)* di mana Thailand diturunkan ke Tier 3, penilaian Tier terendah untuk negara yang pemerintahannya tidak sesuai dengan standar minimum kepatuhan.
- *European Commission telah* mengeluarkan **kartu kuning** (peringatan) bagi produk perikanan yang berasal dari Thailand dan tidak diperbolehkan masuk ke pasar Uni Eropa. *European Commission* meminta Thailand untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dalam rangka perang internasional melawan *illegal, unregulated and unreported (IUU) fishing*

HAK ASASI MANUSIA MERUPAKAN ASPEK PENTING BAGI KEBERLANJUTAN

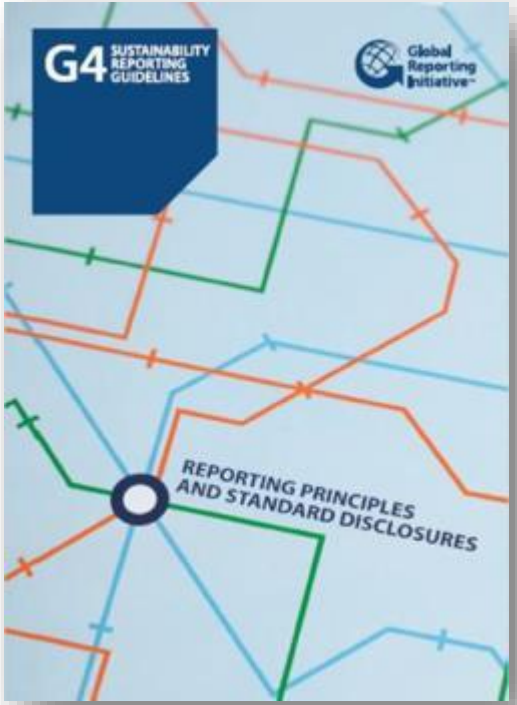

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (G4)

Prinsip-Prinsip Pelaporan dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan

Standar Pengungkapan Spesifik

Pedoman ini mengatur Standar Pengungkapan Spesifik menjadi tiga kategori yaitu Ekonomi, Lingkungan dan **Sosial.**

Kategori sosial ini dibagi lagi menjadi empat sub-kategori, yakni Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak,
Hak Asasi Manusia, Masyarakat dan Tanggung Jawab Produk.

HAK ASASI MANUSIA MERUPAKAN ASPEK PENTING BAGI KEBERLANJUTAN BISNIS

IFC International Finance Corporation World Bank Group

Performance Standards on Environmental and Social Sustainability

January 1, 2012

IFC'S ENVIRONMENTAL AND SOCIAL PERFORMANCE STANDARDS

Mendefinisikan tanggung jawab klien IFC untuk mengelola risiko sosial dan lingkungan mereka.

IFC Sustainability Framework Edisi 2012 yang mencakup Standar Kinerja, berlaku untuk semua klien investasi dan konsultan yang proyeknya melalui proses peninjauan awal kredit dari IFC setelah tanggal 1 Januari 2012.

HAK ASASI MANUSIA MERUPAKAN ASPEK PENTING BAGI KEBERLANJUTAN BISNIS

Coca-Cola

Sustainability Update 2015 - 2016

HUMAN AND WORKPLACE RIGHTS

Coca-Cola Progresses in Advancing Human and Workplace Rights

OUR APPROACH TO HUMAN AND WORKPLACE RIGHTS

The Coca-Cola Company's commitment to respect human rights extends to all aspects of our business conduct and relationships in our value chain. To meet that commitment, in 2015 we continued to study supply-chain risks related to human and workplace rights, expanded our engagement with our associates and key stakeholders and developed new tools for sharing our policies broadly.

DRIVING CHANGE IN OUR AGRICULTURAL SUPPLY CHAIN

In 2013, we committed to completing 28 intensive third-party studies of

an effective tool for engagement with our suppliers, bottling partners and external collaborators. Research and fieldwork is currently underway in India, Mexico and several countries in Africa. Learn more about our country studies.

In July 2016, we published our fourth Myanmar Responsible Investment Report, which provided an update on our ongoing due diligence efforts, progress to date, challenges and opportunities.

The report highlighted our continued focus on advancing a culture of safety and compliance through thousands of hours of training, awareness-raising efforts and safety recognition

10 Years and Counting
Coca-Cola Scores 100 on Corporate Equality Index. Read more.

IN-DEPTH REPORTING

- Human Rights Policy
- Our Progress: Achieving Compliance
- Supplier Guiding Principles
- Addressing Global Human Rights Issues
- Engaging Stakeholders about Human Rights
- Workplace Safety and Health
- Coca-Cola's Diversity Efforts

Coke's director of global workplace rights, Brent Wilton, discusses "What Respect for Human Rights Means to Me."

The Coca-Cola Company
PAID PARENTAL LEAVE
EFFECTIVE JAN. 1, 2017

What's Included? 6 Weeks of Paid Leave for ALL new parents*

Who is Covered?
- Moms
- Dads
- Same-sex partners
- Adoptive parents
- Foster parents

* Non-bargaining employees in the U.S.

OUR PROGRESS

In 2015, we met our

http://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2016/SR16-HWR.pdf

HAK ASASI MANUSIA MERUPAKAN ASPEK PENTING BAGI KEBERLANJUTAN BISNIS

BRITISH PETROLEUM

bp Global

About BP | Customers | Investors | Press | Sustainability | Energy economics | Technology | Magazine

Sustainability > Society > Human rights > Human rights policy

BP and sustainability +

Climate change +

How we operate +

Human rights policy

BP's human rights policy elaborates on the requirement within our code of conduct to treat everyone at BP - and everyone with whom we come into contact - with fairness, respect and dignity

http://www.bp.com/en/global/corporate/sustainability/society/human-rights/human-rights-policy.html

FIHRRST
Foundation for International Human Rights Reporting Standards

TERIMA KASIH

Marzuki Usman

PENDIRI FIHRRST

fihrrst.org